

Analisis Implementasi Aplikasi Srikandi dalam Tata Kelola Arsip Digital pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi

Siti Nurhalizah Hutagalung^{1*}, Shofia Amin², Feny Tialonawarmi³

¹⁻³ Program Studi Manajemen Pemerintahan, Universitas Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sitinurhalizahhtg1009@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to examine the implementation of the Integrated Dynamic Archival Information System (SRIKANDI) application in digital archive management at the Public Works and Public Housing Agency (PUPR) of Jambi Province. This study applies a qualitative approach using descriptive methods. Data collection techniques were carried out through observation, in-depth interviews, and documentation of informants directly involved in archive management and the use of the SRIKANDI application. The analysis of policy implementation in this study is based on Edward III's theory, which covers the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings of the study show that the implementation of the SRIKANDI application in the Road Construction Division has been carried out, but it has not been running optimally. The use of the application is still mostly focused on correspondence activities, while the comprehensive archive management function has not been optimally implemented. Factors supporting implementation include the existence of clear regulations, leadership commitment, and the availability of socialization and training activities. Meanwhile, the obstacles found include limitations in internet network quality, application stability, and differences in the level of human resource capabilities and adaptation to digital systems. This study concludes that the successful implementation of SRIKANDI is not only influenced by the availability of technology, but also by the readiness of organizations and human resources in supporting the transformation of digital archive management. In addition, this study also provides several strategic recommendations to improve the effectiveness of implementation.*

Keywords: *Digital Archives; E-Government; Governance; Policy Implementation; SRIKANDI.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam pengelolaan arsip digital pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi kepada informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan arsip serta penggunaan aplikasi SRIKANDI. Analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini berlandaskan pada teori Edward III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan aplikasi SRIKANDI di Bidang Bina Marga telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan secara maksimal. Penggunaan aplikasi masih lebih banyak difokuskan pada aktivitas surat-menyurat, sedangkan fungsi pengelolaan arsip secara menyeluruh belum terimplementasi secara optimal. Faktor yang mendukung implementasi meliputi keberadaan regulasi yang jelas, komitmen pimpinan, serta adanya kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Sementara itu, hambatan yang ditemukan diantaranya keterbatasan kualitas jaringan internet, kestabilan aplikasi, serta perbedaan tingkat kemampuan dan adaptasi sumber daya manusia terhadap sistem digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SRIKANDI tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan sumber daya manusia dalam menunjang transformasi pengelolaan arsip digital. Selain itu, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi.

Kata Kunci: Arsip Digital; E-Government; Implementasi Kebijakan; SRIKANDI; Tata Kelola.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sudah membawa banyak perubahan terhadap aspek kehidupan, termasuk administrasi dan pemerintahan. Kemajuan tersebut memberikan dampak positif seperti kemudahan dalam memperoleh informasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kartiana, R. F., & Indrahti, 2024). Penerapan e-

government menjadi sarana strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap hal tersebut ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai landasan modernisasi tata kelola pemerintahan (Aura, et al., 2025).

Dalam konteks administrasi pemerintahan, fungsi arsip bersifat fundamental dan esensial. Meskipun seringkali dianggap sebagai tumpukan kertas yang tidak terpakai, UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yaitu rekaman aktivitas atau kegiatan yang diterima dan disusun dari lembaga pemerintah maupun negara daerah (Teku et al., 2024). Oleh karena itu digitalisasi pengelolaan arsip dinamis merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang menjadi pilar *Good governance* dalam kerangka (Shabihah, et al., 2025).

Menindaklanjuti mandat Perpres SPBE, Pemerintah menuturkan SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Aplikasi ini ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang bertujuan dalam mengelola proses arsip dan tata kelola pemerintahan dengan basis elektronik (Puspitasari, 2025). Dasar hukum penerapan aplikasi SRIKANDI diperkuat melalui Keputusan MENPAN-RB Nomor 679 Tahun 2020 mengenai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis Terintegrasi (AUBKD) serta Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.



Gambar 1. Tampilan Login Aplikasi SRIKANDI.

Pengembangan aplikasi SRIKANDI merupakan hasil sinergi antar lembaga pemerintah yang melibatkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai perancang proses bisnis di bidang kearsipan. Selain itu, kolaborasi tersebut juga melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) sebagai pengoordinasi regulasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang bertugas mengembangkan aplikasi serta menyediakan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang berperan dalam penyediaan sistem keamanan dan sertifikasi elektronik (Harahap, et al., 2025)

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan SRIKANDI memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan arsip, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Suyani, et al., (2025) menemukan hambatan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, stabilitas sistem, serta kesiapan sumber daya manusia. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Bappenas menunjukkan bahwa penerapan SRIKANDI masih belum maksimal dan masih memerlukan pembenahan yang mendasar (Zakaria, et al., 2025).

Di Provinsi Jambi, implementasi SRIKANDI telah dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk pada Bidang Bina Marga. Namun, berdasarkan observasi awal, pemanfaatan aplikasi masih dominan pada fungsi surat-menyurat dan belum sepenuhnya mengintegrasikan pengelolaan arsip secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika implementasi kebijakan yang perlu dianalisis secara lebih mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan penggunaan Aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip digital pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi melalui perspektif teori implementasi kebijakan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam penerapannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemanfaatan pendekatan implementasi kebijakan publik dalam menganalisis digitalisasi arsip pada unit teknis pemerintah daerah, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian administrasi publik serta kontribusi praktis dalam mengoptimalkan penerapan SPBE.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian *E-Government*

E-Government yaitu implementasi pada teknologi informasi serta komunikasi (TIK) dari pemerintah sebagai peningkatan mutu pengelolaan pemerintahan serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, memastikan transparansi dan akuntabilitas birokrasi, serta pembentukan keterkaitan hubungan antara masyarakat, sektor usaha serta institusi pemerintahan lain (Kamil Muhdin, R., Engkus, 2022).

Menurut World Bank, *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat akuntabilitas, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi. Sejalan dengan itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan bahwa *E-Government* mendukung interaksi digital antara pemerintah dan warga negara (*government to citizen*). (Putri, et al., 2023)

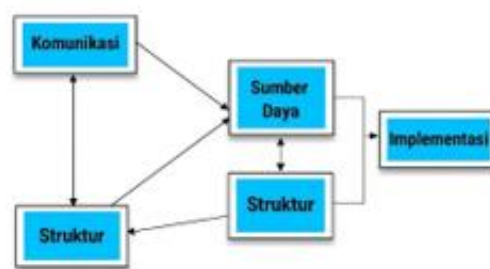
Dalam konteks Indonesia, kebijakan *E-Government* ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang mengarahkan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis elektronik guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan terintegrasi. Maka, berdasarkan berbagai pandangan tersebut, *E-Government* dapat dipahami sebagai strategi transformasi administrasi publik melalui digitalisasi proses kerja, integrasi sistem, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Arief, A., & Abbas (2021) mengelompokkan berbagai tantangan dalam penerapan *E-Government* di Indonesia. Tantangan dalam implementasi *E-Government* tidak hanya memiliki sumber dari keterbatasan teknologi, melainkan dari aspek sumber daya manusia, kebijakan, serta budaya yang saling berkaitan dalam sistem birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan *E-Government* sangat tergantung pada sejauh mana implementasinya terakomodasi ke dalam implementasi kebijakan publik.

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan fase krusial dalam rangkaian kebijakan publik yang menghubungkan proses perumusan kebijakan dengan penerapannya dalam praktik. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada kualitas perancangannya, tetapi juga pada seberapa efektif kebijakan tersebut dilaksanakan.

Model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh empat unsur pokok, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi.



Gambar 2. Faktor penentu keberhasilan implementasi menurut Edward III.

Komunikasi menitikberatkan pada penyampaian informasi kebijakan yang jelas dan konsisten kepada para pelaksana. Sumber daya mencakup ketersediaan tenaga pelaksana, informasi, kewenangan, serta sarana pendukung yang diperlukan. Disposisi berkaitan dengan sikap dan tingkat komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi meliputi keberadaan SOP serta mekanisme koordinasi antarunit kerja.

Model ini relevan untuk menganalisis implementasi sistem digital pemerintahan karena menekankan kesiapan organisasi, kapasitas aparatur, serta dukungan struktural dalam pelaksanaan kebijakan.

Arsip Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan

Dalam Kamus Besar Indonesia, digital artinya “Proses penggunaan atau pemberian sistem digital”. Sementara digitalisasi diartikan pada angka dalam sistem perhitungan tertentu apabila berhubungan pada definisi digitalisasi digitalisasi adalah proses penggunaan dan pemberian sistem digital. Arsip digital merupakan bagian dari transformasi administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Arsip tidak lagi hanya berbentuk fisik, tetapi telah dialihmediakan ke format elektronik guna meningkatkan efisiensi dan keamanan informasi (Pranata, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip didefinisikan sebagai dokumentasi kegiatan atau kejadian yang terekam dalam berbagai bentuk maupun media dan memiliki nilai administratif, hukum, serta historis. Proses digitalisasi arsip memungkinkan pengelolaan dokumen dilakukan secara lebih efisien, terhubung, dan lebih mudah untuk diakses (Puji, A. D., & Rahman, 2025).

Dalam konteks reformasi birokrasi digital, pengelolaan arsip elektronik berkontribusi terhadap:

- a. Efisiensi proses administrasi
- b. Pengurangan penggunaan kertas (paperless)
- c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
- d. Keamanan serta kemudahan pencarian dokumen

Dengan demikian, arsip digital menjadi instrumen penting dalam mendukung implementasi *e-government*.

Aplikasi SRIKANDI

SRIKANDI merupakan akronim dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Penerapannya berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan mendukung integrasi layanan pemerintah ke pemerintah *government to government* (G2G), sehingga aplikasi ini digunakan oleh berbagai instansi baik di tingkat pusat maupun daerah (Aisyah et al., 2024). Dalam kerangka SPBE sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tersebut, pemerintah kemudian mengembangkan aplikasi SRIKANDI sebagai sistem pengelolaan arsip dinamis secara terintegrasi.

Tujuan pokok dari penerapan SRIKANDI adalah untuk mempermudah pengelolaan surat-menyurat serta pelaksanaan administrasi kearsipan (Puspitasari, 2025). Aplikasi ini memfasilitasi proses surat-menyurat dan pengelolaan arsip dalam bentuk elektronik yang dilakukan secara daring dan terhubung secara terpadu, sehingga seluruh datanya tercatat dalam basis data nasional. Melalui penerapan tersebut, SRIKANDI diharapkan mampu mendorong terwujudnya sistem kearsipan tanpa penggunaan kertas mulai dari tahap penciptaan hingga penyusutan arsip, sekaligus meningkatkan mutu, akuntabilitas, serta transparansi pengelolaan arsip sebagai memori kolektif bangsa berbasis digital.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip digital pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi. Pendekatan kualitatif menurut Creswell digunakan untuk menggali makna fenomena sosial berdasarkan perspektif informan, dengan peneliti sebagai instrumen utama (Murdiyanto, 2020). Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI, yang meliputi Sekretaris Bidang, staf administrasi, pengelola arsip, serta operator sistem. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, dengan pedoman wawancara digunakan sebagai instrumen pendukung (Sugiyono, 2022).

Penelitian ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang mencakup empat unsur utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi dipahami sebagai efektivitas penyampaian informasi kebijakan, sumber daya meliputi ketersediaan SDM dan sarana pendukung, disposisi berkaitan dengan sikap serta komitmen pelaksana, sedangkan struktur birokrasi menunjukkan kejelasan SOP dan pola koordinasi yang ada. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam Sugiyono (2022), yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sementara itu, validitas data diperiksa melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu guna menjamin kredibilitas hasil penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, khususnya pada Bidang Bina Marga. Proses pengumpulan data dilakukan selama ± 2 bulan, melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan empat informan, serta dokumentasi terkait penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip digital. Data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan, dan dianalisis berdasarkan model implementasi kebijakan Edward III.

Hasil Temuan

Implementasi Aplikasi SRIKANDI dalam tata kelola arsip digital pada bidang bina marga PUPR Provinsi Jambi

Dalam menganalisis fokus penelitian pada rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi aplikasi SRIKANDI dalam tata kelola arsip digital bidang bina marga PUPR Provinsi Jambi, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III sebagai kerangka analisis. Menurut George C. Edward III, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan oleh terpenuhinya empat unsur utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis penelitian ini juga menggunakan keempat indikator tersebut, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi.

Komunikasi

Dimensi pertama untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi. Karena menurut Edward III Komunikasi merupakan pondasi utama dalam proses implementasi kebijakan yang berhasil, di mana informasi mengenai aplikasi SRIKANDI harus ditransmisikan secara akurat dan konsisten dari pembuatan kebijakan kepada para pelaksana. Dalam penelitian ini komunikasi yang terjalin antara Pimpinan Dinas PUPR dan Pimpinan Bidang Bina Marga dengan Pengelola Aplikasi SRIKANDI sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi aplikasi SRIKANDI. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama: Transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi (Tialonawarmi, 2024).

a. Transmisi Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat informan, dapat disimpulkan bahwa penyampaian kebijakan terkait implementasi aplikasi SRIKANDI pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi telah berlangsung secara bertahap dan tersusun secara sistematis. Informasi kebijakan disampaikan oleh pimpinan sekretariat kepada para pelaksana teknis, kemudian diperkuat melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang mencakup tata cara pengoperasian aplikasi, penginputan surat,

hingga penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Selain penyampaian secara lisan, transmisi juga didukung oleh instrumen formal seperti surat edaran, Surat Keputusan (SK), serta rapat koordinasi resmi. Proses sosialisasi bahkan telah dimulai sebelum implementasi penuh diberlakukan, sehingga para pegawai memiliki pemahaman yang cukup mengenai kewajiban dan mekanisme penggunaan aplikasi SRIKANDI.

b. Kejelasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan DIS selaku tenaga pengelola administrasi, dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi mengenai implementasi aplikasi SRIKANDI telah tersampaikan dengan baik. DIS menyatakan bahwa instruksi yang diterima sudah jelas dan mencakup langkah-langkah teknis penggunaan aplikasi, mulai dari cara login, penggunaan username dan password, hingga alur pengiriman nota dinas dan surat dinas dari staf ke kasi sampai ke kabid. Selain itu, DIS juga menegaskan bahwa materi sosialisasi menjelaskan alur penggunaan aplikasi dari hulu ke hilir sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya (Wawancara, 21 Januari 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pesan kebijakan tidak bersifat ambigu dan telah dipahami secara operasional oleh pelaksana, sehingga berdasarkan indikator kejelasan menurut Edward III, implementasi kebijakan dapat dinilai berjalan dengan baik.

c. Konsistensi

Berdasarkan hasil wawancara dengan BAW sebagai tenaga pengelola arsip, konsistensi komunikasi dalam penerapan aplikasi SRIKANDI tercermin dari adanya pembaruan informasi dan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara rutin setiap enam bulan. BAW menjelaskan bahwa setiap terdapat pembaruan sistem, pihak Dinas Perpustakaan melakukan sosialisasi langsung ke instansi dan membuka ruang penyampaian kendala melalui media grup WhatsApp sebagai sarana koordinasi lanjutan (Wawancara, 19 Januari 2026). Hal ini menunjukkan bahwa informasi kebijakan tidak disampaikan secara berubah-ubah, melainkan dipelihara secara rutin dan berkelanjutan. Pola komunikasi yang terjadwal serta didukung media koordinasi digital tersebut mencerminkan konsistensi instruksi sebagaimana dikemukakan oleh Edward III, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan UW (Wawancara, 21 Januari 2026), dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia dalam implementasi aplikasi

SRIKANDI telah memadai dan terorganisir secara fungsional. UW menyatakan bahwa seluruh pegawai negeri sipil telah memiliki akun akses, namun dalam praktiknya pejabat struktural seperti kepala bidang dan kepala seksi dibantu oleh operator khusus karena tingginya beban kerja manajerial. Penunjukan operator tersebut sangat membantu kelancaran administrasi dan pengelolaan arsip sehingga pekerjaan tetap berjalan tertib. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dari sisi kuantitas dan pembagian peran, SDM telah disiapkan secara proporsional untuk mendukung implementasi kebijakan.

b. Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan DIS (Wawancara, 21 Januari 2026), fasilitas pendukung seperti laptop/komputer dan jaringan internet pada dasarnya telah tersedia untuk menunjang operasional aplikasi SRIKANDI. Namun demikian, DIS mengungkapkan bahwa kendala masih ditemukan pada aspek jaringan, khususnya gangguan Wi-Fi atau sistem yang mengalami down hingga satu hari, sehingga berpotensi menghambat proses administrasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa secara perangkat keras fasilitas sudah memadai, tetapi stabilitas jaringan internet masih memerlukan optimalisasi.

c. Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan BAW (Wawancara, 19 Januari 2026), pengelolaan pendanaan aplikasi SRIKANDI bersumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), sementara unit kerja di Bidang Bina Marga berperan sebagai pengguna aplikasi. Dengan demikian, informasi rinci mengenai alokasi dan pengelolaan anggaran berada pada kewenangan lembaga pembina, bukan pada bidang pengguna. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat anggaran khusus yang dikelola secara mandiri oleh Bidang Bina Marga untuk operasional aplikasi.

Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dengan UW (Wawancara, 21 Januari 2026), penggunaan aplikasi SRIKANDI berjalan lancar karena adanya kemauan pengguna untuk terus belajar dan berkoordinasi apabila mengalami kendala. UW menegaskan bahwa operator dapat bertanya kepada rekan kerja yang lebih dahulu memahami sistem, sehingga pola saling berbagi pengetahuan mendukung kelancaran implementasi. Pernyataan ini menunjukkan adanya kemauan, komitmen, dan sikap kooperatif pelaksana dalam menerima transformasi digital.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan BAW (Wawancara, 19 Januari 2026), implementasi aplikasi SRIKANDI telah didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci, bahkan mengatur standar kop surat, font, margin, hingga alur verifikasi dari staf Kasi ke Kabid. Selain itu, pembagian tugas di setiap seksi telah jelas meskipun tidak seluruhnya dituangkan dalam bentuk SK formal dan lebih bersifat mandat pimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi telah memiliki pedoman kerja yang terstandar dan alur yang sistematis.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Implementasi SRIKANDI.

Indikator	Temuan Utama	Kategori
Komunikasi	Sosialisasi telah dilakukan, dengan efektif	Sangat Baik
Scumber Daya	Keterbatasan SDM dan jaringan internet	Cukup
Disposisi	Dukungan penuh dari pimpinan menjadi penggerak bagi staf untuk terus konsisten menggunakan aplikasi.	Sangat Baik
Struktur Birokrasi	SOP tersedia, namun belum sepenuhnya konsisten diterapkan	Baik

Sumber: Hasil olahan data penelitian, 2026.

Tabel 1 menunjukkan bahwa implementasi SRIKANDI secara umum berjalan baik. Indikator komunikasi dan disposisi berada pada kategori *sangat baik* karena sosialisasi efektif dan adanya dukungan penuh pimpinan. Indikator struktur birokrasi termasuk *baik* karena SOP sudah tersedia meski belum konsisten diterapkan. Sementara itu, sumber daya berada pada kategori *cukup* akibat keterbatasan SDM dan jaringan internet.

Pembahasan

Komunikasi

Komunikasi merupakan indikator yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan sama halnya dengan penerapan aplikasi SRIKANDI di Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil temuan penelitian, proses komunikasi dalam implementasi SRIKANDI telah dilakukan secara berjenjang, tetapi dalam penerapannya masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek yang strategis. Secara teoritis, komunikasi yang efektif dalam implementasi kebijakan diukur melalui tiga dimensi utama yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Pertama, dari dimensi transmisi, informasi mengenai kewajiban penggunaan aplikasi SRIKANDI telah ditransmisikan dari pemerintah pusat melalui ANRI ke pemerintahan Provinsi Jambi, yang kemudian diteruskan oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi. *Kedua*, dimensi kejelasan (*clarity*) informasi memegang peranan vital agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam operasional aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi

SRIKANDI di Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi dikomunikasikan dengan jelas kepada pengelola aplikasi SRIKANDI. *Ketiga*, dimensi konsistensi (*consistency*) merupakan suatu aspek penting dalam mewujudkan efektifnya komunikasi suatu kebijakan publik. Hasil penelitian di Bidang Bina Marga terjaga melalui mekanisme koordinasi yang bersifat rutin dan responsif. Ekstensi komunikasi di bidang bina marga ini berjalan dengan dua cara yaitu adanya sosialisasi yang dilakukan dalam enam bulan sekali dan juga melalui rapat koordinasi bulanan khusus operator sebagai upaya untuk menghadapi dinamika pemeliharaan sistem.

Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan setelah proses komunikasi berjalan secara terstruktur. Merujuk pada pemikiran Edward III, efektivitas implementasi sangat bergantung pada ketersediaan komponen pendukung yang meliputi ketangkasan personel. Dalam hal peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan adaptasi di Bidang Bina Marga tidak hanya bertumpu pada jumlah staf, melainkan pada pembagian peran yang spesifik dan fungsional melalui pembagian tugas pengelola SRIKANDI. Dalam hal ini, peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian antara ketersediaan perangkat keras dan kualitas jaringan internet. Meskipun komputer dan laptop telah tersedia di setiap unit kerja, ketidakstabilan wifi sering menghambat proses verifikasi dan pengarsipan karena SRIKANDI berbasis cloud. Ketergantungan pada server pusat (ANRI/Diskominfo) juga menuntut kesiapan pelaksana saat terjadi maintenance. Dari sisi anggaran, pengelolaan bersifat sentralistik di bawah DPAD Provinsi Jambi sehingga Bidang Bina Marga tidak memiliki alokasi dana mandiri untuk penguatan fasilitas. Secara umum, kompetensi SDM sudah baik, namun infrastruktur jaringan belum stabil sehingga optimalisasi sistem masih perlu dukungan fasilitas yang lebih memadai.

Disposisi

Disposisi pelaksana berada pada kategori sangat positif dan kooperatif. Pegawai menyadari manfaat SRIKANDI dalam meningkatkan efisiensi kerja, khususnya melalui penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang memudahkan proses administrasi. Sikap penerimaan ini meminimalkan resistensi terhadap perubahan sistem dari manual ke digital. Dukungan pimpinan yang suportif serta evaluasi berkala setiap enam bulan turut memperkuat komitmen staf. Selain itu, budaya kerja kolaboratif dan saling berbagi pengetahuan antar-operator menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi (Fajrian & Amin, 2023).

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi telah didukung oleh SOP yang rinci dan teknis, termasuk standar tata naskah dinas serta alur verifikasi dalam aplikasi SRIKANDI. Pembagian tugas melalui

penunjukan operator di setiap seksi menciptakan mekanisme kerja yang sistematis dan akuntabel. Namun, penugasan operator sebagian masih bersifat lisan dan belum seluruhnya didukung oleh Surat Keputusan (SK) formal. Secara keseluruhan, struktur birokrasi sudah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan legalitas administratif agar lebih akuntabel dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI dalam tata kelola arsip digital pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi telah berjalan dengan baik sesuai indikator teori Edward III, meskipun masih memerlukan optimalisasi pada beberapa aspek teknis. Dari dimensi komunikasi, pelaksanaan sudah sangat efektif karena informasi kebijakan ditransmisikan secara berjenjang melalui sosialisasi, bimbingan teknis, rapat rutin, serta koordinasi melalui grup WhatsApp. Pada dimensi sumber daya, kesiapan SDM dan ketersediaan perangkat keras tergolong memadai, namun stabilitas jaringan internet masih menjadi kendala, serta tidak adanya anggaran mandiri karena pengelolaan bersifat sentralistik di bawah DPAD. Dimensi disposisi menunjukkan komitmen dan respons positif aparatur terhadap manfaat efisiensi SRIKANDI, terutama melalui penggunaan Tanda Tangan Elektronik, yang didukung penuh oleh pimpinan. Sementara itu, dimensi struktur birokrasi telah memiliki SOP yang rinci dan pembagian tugas yang jelas, meskipun penunjukan operator belum seluruhnya diperkuat dengan Surat Keputusan formal. Secara umum, faktor pendukung utama adalah kejelasan SOP, komitmen pimpinan, dan efisiensi sistem digital, sedangkan faktor penghambat utama meliputi ketidakstabilan jaringan internet, ketergantungan pada maintenance server pusat, dan keterbatasan kemandirian anggaran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan agar Dinas PUPR Provinsi Jambi, khususnya Bidang Bina Marga, memprioritaskan peningkatan kapasitas dan stabilitas jaringan internet guna mendukung operasional SRIKANDI yang berbasis online. Kepada DPAD Provinsi Jambi sebagai instansi pembina, disarankan untuk menyediakan modul panduan teknis yang komprehensif serta meningkatkan pendampingan teknis, terutama saat terjadi pemeliharaan atau pembaruan sistem. Selain itu, staf pelaksana diharapkan terus menjaga komitmen dan meningkatkan literasi digital agar pemanfaatan

fitur SRIKANDI dapat dilakukan secara menyeluruh dan optimal dalam mendukung tata kelola arsip digital yang akuntabel dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 8(1). <https://doi.org/10.33387/protk.v8i1.1978>
- Aura, D., Santoso, F., Sulistyorini, E., Rahma Wati, E., Sugeng Cahyono, A., Ima Herminingsih, D., & Tulungagung, U. (2025). Pemanfaatan Aplikasi Srikandi Dalam Pengelolaan Arsip Pemerintah Kabupaten Tulungagung. *Journal Of Governance And Public Administration (Jogapa)*, 2(2). <https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i2.1671>
- Fajrian, A., & Amin, S. (2023). TEHADAP KINERJA PERBANKAN DENGAN PENCEGAHAN FRAUD SEBAGAI VARIABEL MEDIATING (STUDI KASUS PT. BANK PEMBANGUNAN DERAH JAMBI CABANG TEBO). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 12(03), 703-717.
- Harahap, M. D., & Trimurni, F. (2025). Kualitas Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Dalam Pelayanan Administrasi Di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(1), 295-312. <https://doi.org/10.54082/jupin.984>
- Kamil Muhdin, R., Engkus, & H. (2022). Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Sibadra Pada Pemerintah Kota Bogor. *Distingsi: Journal Of Digital Society*, 1(1).
- Kartiana, R. F., & Indrahti, S. (2024). Pemanfaatan Aplikasi Srikandi Terhadap Pengelolaan Arsip Dinamis Dalam Rangka Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal) (Edisi I -2020)*. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Upn "Veteran" Yogyakarta Press.
- Pranata, M. R. (2024). Arsip Digital Untuk Efisiensi Pengelolaan Dan Percepatan Pelayanan. *Significant. Journal Of Research And Multidisciplinary*, 3(1), 162-172. <https://doi.org/10.62668/significant.v3i01.891>
- Puji, A. D., & Rahman, I. T. (2025). Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Dalam Digitalisasi Arsip (Studi Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Batu), 19(4), 19-29.
- Puspitasari, D. T. (2025). Pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Dalam Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Kediri. *J-Kip (Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan)*, 6(1). <https://doi.org/10.25157/j-kip.v6i1.16349>
- Putri, W. A., Eldora, P. D., & Rahma Azzahra, M. (2023). Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern: Kajian Literatur Di Kota Medan, 5(2), 36-51.
- Shabihah, S. A., Ryanindityo, M., Pengayoman, P., & Nurkumalawati, I. I. (2025). Peran E-Governance Sebagai Instrumen Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas

- Pemerintahan Di Indonesia. *Journal Of Adminstration And International Development*, 5(1). <https://doi.org/10.52617/jaid.v5i1.731>
- Suyani, A., Winarti, & Tri Haryanto, A. (2025). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Pemerintah Kabupaten Madiun. *Jurnal Ilmiah Indonesia, Januari*, 5(1), 302-317. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i1.2407>
- Teku, M. V., Gobang, J. K. G. D., Retu, M. K., & Sedu, A. (2024). Digital Transformation Of Archives Through The Srikandi Application. *International Journal Of Education And Sosial Science*, 6(2). <https://doi.org/10.56371/ijess.v5i2.334>
- Tialonawarmi, F. (2024). PENGARUH REKRUTMEN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION DI JAMBI. 3(2), 323-333. <https://doi.org/10.55903/juria.v3i3.187>
- Zakaria, T. Z., Deliarnoor, N. A., & Sukarno, D. (2025). Srikandi And Indonesia's E-Government Policy: System Reliability And The Crucial Role Of Political Commitment. *10*(1), 81-93. <https://doi.org/10.24198/jwp.v10i1.57854>